BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Cina merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan total sekitar 1,4 miliar jiwa.[1] Keadaan yang demikian kemudian menjadikan Cina sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian Asia, bahkan dunia. Perekonomian Cina mulai mengalami perkembangan sejak tahun 1976, ketika modernisasi dimulai di negara ini.[2] Dan terus berkembang massif hingga sekarang. Dalam membangun perekonomiannya, Cina memiliki sebuah strategi yang dikenal dengan istilah *Beijing Consensus* yang dirumuskan atas tiga hal: (1) pembangunan negara berlandaskan inovasi, (2) keberhasilan ekonomi tidak dilihat dari GDP per kapita saja, tetapi juga dengan kesinambungan (*sustainability*) dan tingkat mutu, (3) keteguhan diri (*self-determination*) bagi Cina.[3]

Strategi ini yang diterapkan Cina untuk mengembangkan kualitas perekonomiannya. Hingga pada akhirnya terbentuk Cina seperti sekarang ini, yang merupakan negara dengan *Gross Domestic Product* (GDP) terbesar kedua setelah Amerika Serikat.[4] Perekonomian yang massif dan pesat ini dimiliki oleh Cina tidak hanya disebabkan oleh sektor perdagangan saja, tetapi juga dalam

[1] Worldometers. 2020. *China Population*. Tersedia di https://www.worldometers.info/world-population/china-population/
[2] Silfiana D. 2018. *Pembangunan Ekonomi Cina Berdasarkan Teori Deng Xiaoping Dan Konsep Tiga Perwakilan.* Tersedia di https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id
[3] Ramo J.C. 2004. *The Beijing Consensus.* London: Foreign Policy Centre
[4] Statistictimes. 2019. *Projected GDP Ranking*. Tersedia di https://www.statistictimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php

sektor lainnya seperti investasi dan pembangunan infrastruktur di beberapa kawasan. Salah satu upaya Cina dalam hal ini terbukti dengan pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) pada tahun 2016.

Singkatnya, *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) adalah bank pembangunan multilateral dengan misi dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia lewat aliran investasi dan pembangunan infrastruktur. *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) mulai beroperasi pada Januari 2016 dengan kantor pusat di Beijing, Cina.[5] Inisiasi pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) sendiri datang dari Cina. Wacana terkait pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) ini mulai ada sejak tahun 2013. Tepatnya saat itu Cina, lewat Presiden Xi Jinping menyampaikan insiatif terhadap pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* pada forum pertemuan *Asia-Pacific Economic Cooperations (APEC) Leaders* pada Oktober 2013 di Bali, Indonesia.[6] Inisiatif tersebut disambut dengan baik oleh negara-negara kawasan Asia. Terbukti dengan adanya pembahasan lebih lanjut setelahnya dan dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait pendirian *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) oleh 21 negara Asia di tahun 2014.[7]

---

[5] Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). nd. *About AIIB*. Tersedia di https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html

[6] Badan Kebijakan Fiskal. (n.d). *Penandatanganan MoU Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB).* Tersedia di https://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20141128162326562467358

[7] *Ibid.*

Bagi Cina, kawasan Asia merupakan kawasan yang penting dan memiliki potensi dalam perekonomian global. Hanya saja tidak semua negara kawasan Asia memiliki kemampuan dana dan fasilitas infrastruktur terkait hal tersebut, khususnya negara-negara berkembang. Banyak negara-negara berkembang di kawasan Asia yang masih jauh tertinggal dan belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk bersaing dalam perekonomian global. Ditambah lagi dengan terbatasnya kemampuan lembaga keuangan internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (WB) untuk memberikan pendanaan kepada semua negara-negara berkembang yang tertinggal. Adanya kesenjangan dalam pendanaan di kawasan Asia ini yang kemudian menjadi dorongan bagi Cina dalam pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB).

Kendati demikian, pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) juga tidak dapat dilihat dari satu sisi saja. Faktor-faktor lainnya yang bersifat domestik dari Cina sendiri juga perlu untuk dikaitkan dalam hal pembentukan lembaga keuangan ini. Melihat kondisi domestik Cina, di tahun 2013, di tahun yang sama saat Cina menginisiasi pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) Cina juga sedang menggarap salah satu proyek besar yang bernama *Belt Road Initiative* (BRI).[8]

Dalam hal ini, *Belt Road Initiative* (BRI) merupakan proyek besar dan sekaligus kebijakan ambisius Cina. Dikatakan sebagai proyek raksasa dan ambisius karena dalam proyek tersebut, Cina berambisi untuk membentuk jalur

[8] Peter Cai. 2017. *Understanding China's Belt and Road Initiative*. Lowy Institute For International Policy. Tersedia di https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding-belt-and-road-initiative

perdagangan yang menghubungkan tiga benua sekaligus, yakni Asia, Eropa, dan Afrika. Jalur ini rencananya akan dimulai dengan pembangunan jalur darat yang menghubungkan provinsi tertinggal bagian barat Cina dengan Eropa melalui Asia Tengah (*Silk Road Economic Belt)*, dan kemudian pembangunan jalur laut yang menghubungkan provinsi pesisir Cina dengan kawasan Asia Tenggara dan Afrika melalui pelabuhan dan jalur kereta api (*the 21st Century Maritime Silk Road).*[9] Dengan rencana yang demikian, tentu Cina membutuhkan kerja sama dengan negara-negara kawasan Asia, Eropa, dan Afrika tersebut.

Gambar 1. 1 Jalur *Belt Road Initiative* (BRI)[10]

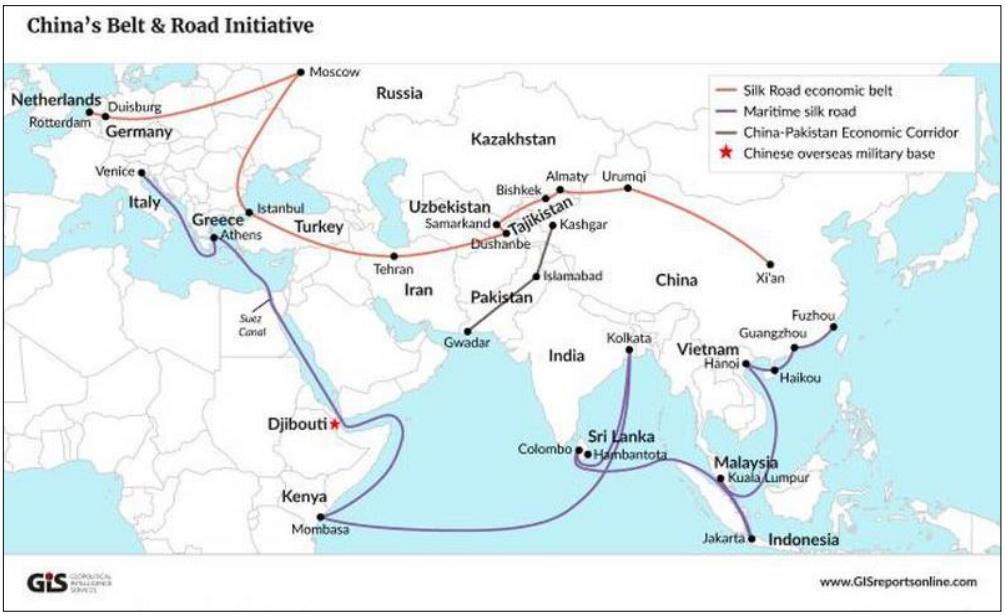

(Sumber: GIS tersedia di https://www.gisreportonline.com/debate-what-chinas-new-silk-road-means-for-europe,2425,c.html)

[9] *Ibid.*

[10] Geopolitical Intelligence Services (GIS). 2017. *Debate: What China's new Silk Road means for Europe.* Tersedia di https://www.gisreportonline.com/debate-what-chinas-new-silk-road-means-for-europe,2425,c.html

Melihat besarnya ambisi Cina lewat proyek *Belt Road Initiative* (BRI), maka tentu dalam pembiayaannya Cina memerlukan aliran modal yang cukup besar. Maka dari itu, bukan tidak mungkin bagi Cina membentuk *Asian Infrastucture Investment Bank* (AIIB) sebagai bagian dari proyek tersebut. Dengan kata lain, pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) ini memiliki kaitan dengan proyek ambisius *Belt Road Initiative* (BRI) ini. Dimana selain menjadi sumber pendanaan utama bagi proyek *Belt Road Initiative* (BRI), *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) juga mempermudah pergerakan Cina untuk mengajak negara-negara anggota untuk turut bergabung dan mendukung proyek *Belt Road Initiative* (BRI) ini.

Terkait investasi dan pembangunan infrastruktur, pun sebenarnya Cina masih bisa untuk melakukan hal tersebut ke negara-negara berkembang tanpa adanya *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Terbukti bahwa jauh di tahun-tahun sebelumnya, sebelum *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dibentuk, investasi Cina di kawasan Asia sangat besar dan tidak perlu diragukan lagi. Cina merupakan penanam modal terbesar di beberapa regional utamanya di Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Asia Selatan.

Contoh singkatnya saja di tahun 2013, Cina bekerja sama untuk melakukan salah satu proyek infrastruktur terbesar seperti membangun saluran line-D pipa gas alam dengan negara-negara Asia Tengah seperti Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan.[11] Pun di kawasan Asia Selatan. Di tahun

[11] The Economist. 2016. *One Belt One Road: an economic roadmap*. Tersedia di https://www.eiu.com/topic/one-belt-one-road

2015, Cina memberikan investasi sebesar US$ 500 juta terhadap proyek pembangunan pelabuhan di Sri Lanka.[12] Cina juga memberikan investasi sebesar US$ 46 miliar kepada Pakistan untuk membangun jalur transportasi dan infrastruktur lainnya.[13]

Gambar 1. 2 Aliran Investasi Cina di ASEAN[14]

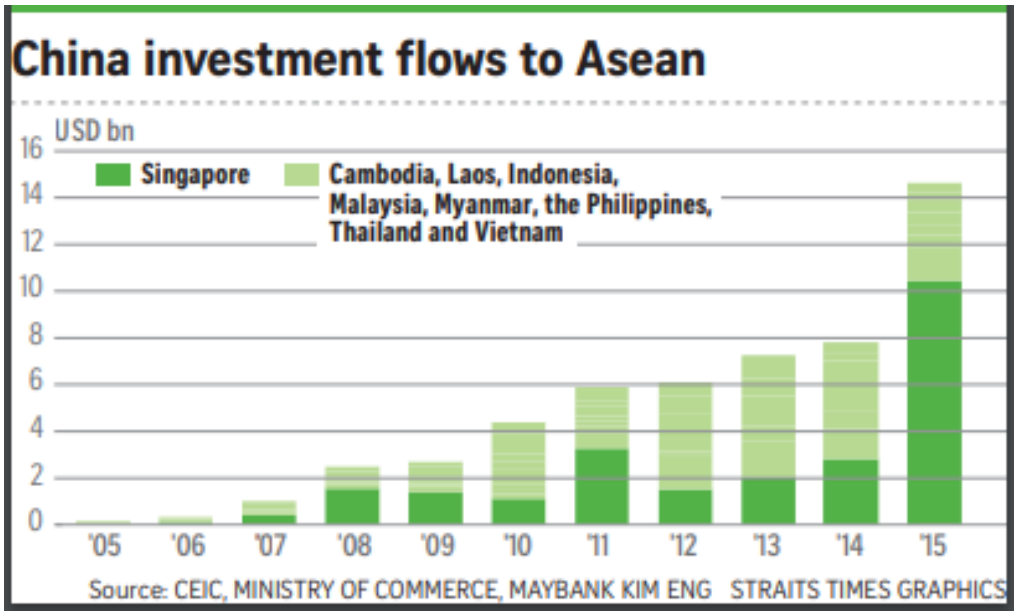

(Sumber: CEIC tersedia di https://straitstimes.com/business/economy/major-belt-and-road-gains-for-asean)

Kemudian di Asia Tenggara, pada tahun yang sama, sebesar US$ 14,5 miliar investasi didominasi oleh Cina di bawah kerangka ASEAN, dan 71 persen diantaranya mengalir di Singapura.[15]

---

[12] AA Gede Agung Kepakisan. 2018. *Respon Kebijakan Luar Negeri "Neighborhood First" India terhadap Kerja Sama Bilateral China Pakistan Economic Corridor 2015*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 7 No.3 , hal. 20

[13] *Ibid.* hal. 21

[14] Chia Yan Min. 2017. *Major Belt and Road Gains for ASEAN*. Tersedia di https://www.straitstimes.com/business/economy/major-belt-and-road-gains-for-asean

[15] *Ibid.*

Melihat kenyataan tersebut, menjadi anomali tersendiri ketika Cina beranggapan bahwa *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) akan memberikan kemudahan bagi negara-negara untuk membangun kawasan Asia menjadi lebih baik lewat aliran investasi dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan di satu sisi tanpa adanya *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), Cina sudah menjadi investor bagi kawasan ini jauh di tahun-tahun sebelumnya.

Ditambah lagi dengan keberadaan beberapa lembaga keuangan internasional di yang sudah beroperasi sebelumnya di kawasan Asia seperti *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* (WB), dan *Asia Development Bank* (ADB). Pada dasarnya, keberadaan tiga lembaga tersebut memiliki tujuan yang serupa yaitu untuk memberikan kesejahteraan sosial dan dukungan pembangunan ekonomi lewat aliran dana yang diberikan. *Asia Development Bank* (ADB) misalnya. Bank ini sudah beroperasi sejak 1966 dan memiliki sumbangan modal mencapai US$ 163 miliar.[16] Yang kemudian dikelola untuk pembangunan negara-negara kawasan Asia. Dalam hal ini Cina adalah salah satu dari lima pemegang saham (*shareholders)* terbesar di *Asia Development Bank* (ADB).[17] Hal ini menunjukkan bahwa jauh sebelum ada wacana pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) Cina sudah mumpuni dalam mendukung pembangunan kawasan Asia lewat perannya di *Asia Development Bank* (ADB). Hal-hal demikian yang kemudian menciptakan anomali tersendiri terhadap

[16] Anggara Raharyo. 2018. *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) as an Instrument for Regional Leadership of China in the East Asia Region.* AEGIS Vol. 2 No. 2, hal. 120
[17] *Ibid.*

kemunculan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) secara tidak terduga di tahun 2016.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat penulis adalah: Mengapa Cina membentuk *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) pada tahun 2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dinamika dalam proses pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) di kawasan Asia.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong Cina untuk membentuk *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) pada tahun 2016.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Great Power Diplomacy*

Dalam kajian diplomasi, terdapat klasifikasi diplomasi yang dilakukan berdasarkan aktor-aktor yang terlibat dalam proses diplomasi itu sendiri, salah satunya ialah *great power diplomacy*. *Great power* sendiri diartikan sebagai aktor, dalam hal ini negara, yang memberikan pengaruh bagi negara-negara lainnya dalam skala internasional.[18] Segala tindakan atau pun kebijakan yang dilakukan oleh *great power* akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap dunia internasional. Dampak langsung dapat terjadi secara verbal, seperti pidato yang diberikan oleh kepala negara. Sedangkan dampak tidak langsung dapat dilihat dari aturan, perjanjian, dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara tersebut. Dengan kata lain, *great power diplomacy* adalah sebuah cara *great power* untuk memainkan perannya terhadap yang lain dalam kerangka dunia internasional.

Secara umum terdapat dua instrumen utama yang digunakan oleh *great power* untuk melakukan diplomasi. Kedua instrumen tersebut yaitu kemampuan militer dan kemampuan ekonomi.[19] Kedua instrumen ini merupakan instrumen mendasar yang dimiliki oleh sebuah negara. Baik kemampuan militer dan kemampuan ekonomi dipandang sebagai kekuatan dari *great power* dalam melaksanakan diplomasi dan mendorong negara-negara lain (*minor powers*) untuk mau mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan terhadap *great power*.

[18] Costas M. Constantinou, Kerr, Puline and Sharp. 2016. *The SAGE Handbook of Diplomacy*. London: Sage Publication Ltd., hal. 268
[19] *Ibid.*

Negara-negara lain kemudian akan lebih memperhatikan tingkah laku dan pemikirannya terhadap *great power*. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa apapun yang dilakukan *great power* akan berdampak bagi negara-negara tersebut, entah berdampak menguntungkan atau merugikan.

Contoh singkat penerapan hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan Amerika Serikat, sebagai salah satu *great power* di dunia menggunakan kemampuan ekonomi sekaligus militernya dalam konflik antara Israel dan Palestina. Konflik Israel dan Palestina seperti yang diketahui sudah berlangsung lama dan melibatkan beberapa negara-negara lain secara tidak langsung. Amerika Serikat sebagai salah satu *great power* dalam hal ini turut membantu dalam mendanai militer dari Israel. Setiap tahunnya Amerika Serikat memberikan dana bantuan sekitar US$ 3,1 miliar.[20] Juga, lewat keterlibatannya dalam Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat turut membantu dalam resolusi konflik yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan bagi dua negara.

Kemudian, terdapat dua cara yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu negara agar dapat dikatakan sebagai *great power* atau tidak. Yang pertama ialah atas dasar pernyataan atau pengakuan dari negara lain.[21] Dimana negara-negara lain dengan sepakat menyatakan suatu negara sebagai *great power* dalam kondisi dan periode tertentu. Yang kedua ialah dengan menilai suatu negara berdasarkan indikator-indikator tertentu yang mengacu pada karakteristik *great*

[20] Deutsche Welle. 2016. *Daftar Negara Penerima Bantuan Militer Amerika*. Tersedia di https://www.dw.com/id/daftar-negara-penerima-bantuan-militer-amerika/g-19164404

[21] Jon Rynn. 2001. *Dissertation: The Power to Create Wealth: A Systems-Based Theory of the Rise and Decline of the Great Powers in the 20th Century*. Political Science, The City University of New York., hal. 3.

power.[22] Kenneth Waltz memaparkan bahwa ada lima indikator untuk menentukan apakah suatu negara tergolong sebagai *great power* atau tidak.[23] Kelima hal tersebut antara lain ialah *size and territory, resource endowment, economic capabilities, political stability and competence*, serta *military strength.*[24] Kelima indikator tersebut dapat dikatakan sebagai atribut nasional yang dimiliki suatu negara, dalam hal ini *great power*, untuk melakukan suatu tindakan yang berpengaruh bagi sistem internasional. Dalam penelitian ini, *size and territory* dan *economic capabilities* adalah dua indikator utama, yang juga merupakan atribut nasional, yang akan digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi.

Ketika sebuah negara menyandang status *great power*, negara tersebut memainkan peran yang penting dalam hubungan internasional. Lewat keberadaannya, *great power* sangat diharapkan untuk menunjukkan adanya upaya pemecahan masalah (*demonstrate resolve*), memberikan ketentraman (*reassure allies*), dapat dipercaya (*protect credibility*), dan menunjukkan kepemimpinannya (*show leadership*).[25] Upaya-upaya tersebut dapat terjadi apabila *great power* berinisiatif untuk mengambil sebuah tindakan dan tidak bersikap egois atas kondisinya sendiri. Perwujudan dari hal ini dapat dilihat dari bagaimana Amerika Serikat, salah satu *great power* di dunia berperan sebagai mediator guna resolusi konflik Israel dan Palestina yang sudah disinggung sebelumnya. Mediasi tersebut dilakukan beberapa kali, seperti Perundingan Oslo (1993), Perundingan Hebron

[22] *Ibid.*
[23] Kenneth Waltz. 1979. *Theory of International Politics*. New York: McGraw-Hill., hal. 131
[24] *Ibid.*
[25] Costas M Constantinou., *op. cit.*, hal. 268

(1997), Perundingan Wye River (1997), hingga Konferensi Annapolis (2007).[26] Peran sebagai mediator ini yang mencerminkan bahwa Amerika Serikat, sebagai *great power*, berusaha menunjukkan adanya pemecahan masalah (*demonstrate resolve*), memberikan ketentraman (*reassure allies*), dapat dipercaya (*protect credibility*), dan menunjukkan kepemimpinannya (*show leadership*).

Dengan kata lain, *great power* menjadi sorotan utama dunia karena tugas dan tanggung jawab yang diemban untuk menciptakan kesejahteraan dan stabilitas internasional. Untuk merealisasikan hal tersebut, *great power* akan memanfaatkan segala yang dimilikinya untuk menjamin kesejahteraan internasional. Karena ada keyakinan bahwa *great power* mampu melakukan hal tersebut dengan kapabilitasnya, yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain.

1.4.2 *National Attribute*

Untuk menganalisis tindakan atau arah kebijakan suatu negara, terdapat pendekatan yang dikenal dengan *level of analysis* atau perangkat analisis. Singkatnya, perangkat analisis ini digunakan untuk memperjelas "apa" pilihan atau keputusan yang diambil oleh "siapa" dan berada di "kondisi" yang bagaimana keputusan itu terjadi. Perangkat analisis terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu teori *microlevel* dan teori *macrolevel.*[27] Pada teori *microlevel*, perangkat analisis yang digunakan untuk mengetahui mengapa suatu kebijakan luar negeri terbentuk ialah didasarkan pada apa yang terjadi dalam level individu

[26] Vera Ellen Paat. nd. *Posisi Amerika Serikat dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel*. FISIP Universitas Sam Ratulangi.
[27] Valerie M Hudson. 2008. *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Rowman & Littlefield Publishers Inc., hal. 161

(*psychological factors*), kelompok (*small and large group effects*), identitas (*culture and social discourse*), dan keadaan politik domestik (*domestic politics*).[28] Sedangkan pada *macrolevel*, perangkat analisis didasarkan pada *national attribute* dan *international system.*

Dalam *level of analysis* dari *national attribute* sendiri terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisa alasan mengapa suatu negara mengambil sebuah tindakan, antara lain ukuran (*size*), sumber daya alam (*natural resources*), kondisi geografi (*geography*), demografi (*demographics*), sistem politik (*political system*), kapabilitas militer (*military capabilities*), dan kapabilitas ekonomi (*economic capabilities).* [29] Indikator-indikator tersebut dipandang sebagai suatu kekuatan dan pertimbangan yang dimiliki suatu negara dalam bertindak. Pada fenomena ini, perangkat analisis *national attribute* dengan indikator ukuran (*size)* dan kapabilitas ekonomi (*economic capabilites*) merupakan indikator yang mendukung suatu negara untuk melakukan tindakan sebagai bentuk *great power diplomacy.* Sejalan dengan karakteristik *great power*, *size and territory* dan *economic capabilities* merupakan dua indikator yang dimiliki *great power* yang sangat berkesinambungan. Ukuran dan letak teritorial suatu negara akan berdampak pula bagi kapabilitas ekonomi suatu negara.

Size atau ukuran yang dimiliki suatu negara merupakan satu dari beberapa atribut nasional. Ukuran suatu negara adalah hal yang bersifat *given* dan merupakan aset terlihat yang dapat diukur. Perangkat analisis *national attribute*

[28] *Ibid.*
[29] *Ibid.,* hal. 162

berasumsi bahwa negara besar (*large state*) biasanya cenderung lebih atraktif dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya terhadap yang lain, terutama terhadap negara-negara yang lebih kecil (*small state*).[30] Tidak hanya itu, *large state* juga cenderung lebih aktif dan tegas dalam segala tindakannya. Hal ini dikarenakan sebagian besar *large state* memilih untuk berani mengambil tanggung jawab yang besar dalam perpolitikan dunia.[31] Di beberapa kondisi tujuan kebijakan luar negeri dari *large state* juga akan meluas apabila didukung dengan kapabilitas atau atribut nasional lain yang dimilikinya. Namun hal demikian juga tidak dapat digeneralisir begitu saja. Karena pada kenyataannya tidak semua *large state* melakukan hal demikian.[32]

Large state akan lebih atraktif ketika dibarengi dengan elemen pendukung lainnya selain ukuran negaranya yang besar, seperti letak teritorial yang strategis. Letak teritorial yang strategis ialah ketika suatu negara terletak secara geografis di jalur lalu lintas perdagangan global. Negara yang demikian akan bersinggungan secara langsung dengan aktivitas perdagangan global dan akan mendatangkan keuntungan bagi *large state*, terutama dalam hal kerja sama multilateral dalam perdagangan.[33]

Selain hal tersebut, atribut nasional lainnya adalah *economic capabilities* atau kapabilitas ekonomi. Kapabilitas ekonomi adalah elemen yang sangat memengaruhi tindakan suatu negara. Kapabilitas ekonomi tentu dimiliki oleh

---

[30] *Ibid.*, hal. 163
[31] Bojang AS. 2018. *The Study of Foreign Policy in International Relations*. Journal of Political Science & Public Affairs 6: 337, hal. 5
[32] *Ibid.*
[33] *Ibid.*

seluruh negara di dunia, meskipun dalam batas kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkah laku suatu negara dapat ditentukan dari kekayaannya, entah besar atau kecil. Di beberapa kondisi, negara dengan kapabilitas ekonomi yang kecil akan terbatas dalam memposisikan diri dalam menentukan kebijakan luar negerinya terhadap negara lain. Sebaliknya, negara kaya dengan kapabilitas ekonomi yang besar akan selalu mendapat apa yang diinginkan dengan mudah dan leluasa.

Hal lainnya yang menjelaskan bahwa suatu negara memiliki *economic capabilities* yang kuat ialah pada saat negara lain bergantung terhadap negara tersebut.[34] Dimana suatu negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan hal sebaliknya tidak terjadi pada negara lain. Ketergantungan ini dapat dilihat dengan mudah pada aspek perdagangan.[35] Kondisi ketergantungan ini sering ditemukan pada negara berkembang terhadap negara yang memiliki kapabilitas ekonomi besar, yang memiliki komoditas yang dibutuhkan. Sehingga hal ini memungkinkan negara dengan kapabilitas ekonomi besar menjadikan kondisi seperti ini untuk mendatangkan masa sulit bagi negara yang bergantung.

Tidak hanya sebatas ketergantungan dalam perdagangan saja, *economic capabilities* yang dimiliki oleh suatu negara dapat juga berupa instrumen ekonomi lainnya seperti bantuan (*aid*), pinjaman (*loans*), investasi (*investment*), penjualan surat utang negara, manipulasi mata uang (*currency manipulation*), dan embargo

[34] Valerie M. Hudson., *op. cit.* hal. 170
[35] *Ibid.*

(*embargoes*) yang diberikan kepada negara lain.[36] Negara dengan kapabilitas ekonomi yang besar, akan menggunakan instrumen-instrumen tersebut sebagai pertimbangan dalam memutuskan kebijakan suatu negara. Negara tersebut akan lebih mudah menilai seberapa besar pengaruh yang akan tercipta lewat instrumen-instrumen ekonomi tersebut. Sehingga dalam situasi yang seperti ini maka akan terlihat jelas "siapa aktor yang lebih butuh siapa". Dengan situasi demikian, negara dengan kapabilitas ekonomi yang lebih mumpuni akan lebih agresif dan berani dalam bertindak atau membuat suatu kebijakan. Karena memiliki *power* yang lebih dibandingkan lainnya.

[36] Daniel W Drezner. 1999. *The Sanctions Paradox: Economic Statecraftand International Relations.* Cambridge: Cambridge University Press. American Journal of Political Science No. 44, hal. 733

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1. 3 Sintesa Pemikiran

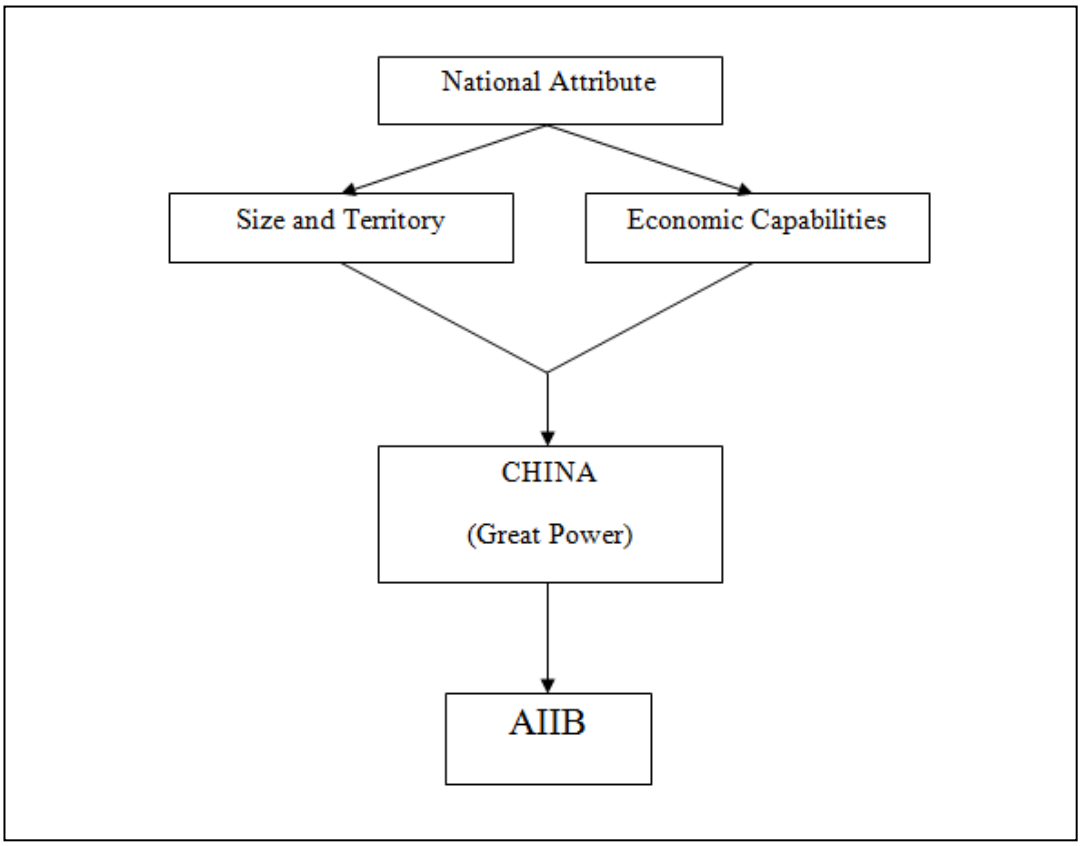

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terbentuklah sintesa pemikiran sebagai berikut. *National attribute* adalah perangkat analisa yang digunakan untuk mengetahui alasan dibalik tindakan atau kebijakan luar negeri suatu negara. Terdapat dua indikator *national attribute* yang juga diperjelas sebagai indikator suatu negara sebagai *great power* untuk menciptakan kesejahteraan internasional, yaitu *size and territory* dan *economic capabilities.* Kesinambungan antara kedua indikator ini

kemudian menjadi jaminan kuat bagi negara untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai *great power*.

Dalam hal ini *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) adalah salah satu bentuk wujud *great power diplomacy* yang dilakukan oleh Cina demi menciptakan kesejahteraan internasional.

1.6 Argumen Utama

Tindakan Cina dalam membentuk *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) di kawasan Asia merupakan manifestasi dari *great power diplomacy.* Cina sendiri merupakan salah satu *great power* di kawasan Asia. Hal ini mengartikan bahwa Cina memiliki tanggung jawab tersendiri untuk menjamin kesejahteraan kawasan Asia.

Karena sebagai *great power*, suatu negara memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan serta stabilitas internasional. *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) merupakan salah satu cara Cina untuk menjalankan tanggung jawab *great power* tersebut dalam kerangka investasi dan pembangunan infrastruktur di Asia. Kesejahteraan akan tercipta ketika negara-negara memiliki infrastruktur yang memadai guna meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur akan terealisasi ketika negara memiliki sumber dana yang cukup untuk hal tersebut. Maka dari itu, bagi beberapa negara, khususnya negara ekonomi tertinggal di kawasan Asia, aliran investasi yang diberikan oleh *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) merupakan jalan keluar yang efektif.

Sebagai *great power*, Cina memiliki dua indikator utama yang dikenal dengan *national attribute*, yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yaitu *size and territory* serta *economic capabilities*. Dengan kata lain, kedua atribut nasional tersebut menjadi faktor pendukung Cina dalam melaksanakan *great power diplomacy*. Kedua hal tersebut yang kemudian memberanikan Cina untuk membentuk *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB).

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel yang saling berkaitan satu sama lain.[37] Dikatakan sebagai penelitian eksplanatif, karena penelitian ini dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi.[38]

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel utama, yaitu Cina, *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), dan tahun 2016. Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk menjelaskan apa yang menjadi alasan Cina untuk membentuk *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) pada tahun 2016.

[37] Ulber Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama, hal. 30
[38] Bambang Prasetyo & Lina M. J. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada., hal. 43.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian berkaitan dengan seberapa jauh penelitian yang dilakukan oleh penulis dan merupakan batasan dalam penelitian. Untuk menganalisa pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang dilakukan oleh Cina pada tahun 2016, maka penulis membatasi jangkauan penelitian ini dari tahun 2010, ketika Cina mulai berpengaruh sebagai *great power* di kawasan Asia sampai tahun 2016, ketika *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) mulai beroperasi secara resmi.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah hal yang sangat penting untuk menunjang penelitian. Pengumpulan data adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh data empiris dan informasi dengan menggunakan metode tertentu.[39] Informasi yang dikumpulkan kemudian akan memperjelas suatu fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis pada penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*).

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi.[40] Meliputi data-data dari pihak pertama yakni data dari lembaga atau yang dimuat dalam situs pemerintahan. Kemudian data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau lebih sumber-sumber lain yang telah tersedia

[39] Ulber Silalahi., *op.cit.* hal. 280
[40] *Ibid*, hal. 289

sebelum penelitian dilakukan.[41] Meliputi data-data yang tertuang dalam literatur-literatur terdahulu seperti buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, dan artikel dari situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis kualitatif merupakan suatu proses pengumpulan data yang digunakan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada gambaran lengkap yang dibentuk dengan kata-kata.[42] Analisis data kualitatif biasanya dilakukan dengan cara penyertaan studi kasus dan observasi.[43] Teknik ini biasanya menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis mendalam terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati.[44] Juga analisis lebih berfokus pada subjek dari penelitian terkait.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam empat bab utama. Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

---

[41] Ibid., hal. 291
[42] Neuman W Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.* Boston: Allyn and Bacon., hal. 477
[43] *Ibid.*
[44] *Ibid.*

BAB II berisi mengenai profil *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), dinamika negara anggota dalam pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), dan kesenjangan infrastruktur dan dana di kawasan Asia yang menjadi alasan bagi Cina untuk membentuk *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB).

BAB III berisi mengenai data-data yang menunjukkan status *great power* yang dimiliki Cina di kawasan Asia, *national attribute* yang dimiliki oleh Cina yang berupa posisi sebagai *largest state* (*size and territory*) dan *economic capabilities* yang dimiliki oleh Cina sebelum *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) terbentuk, serta menjelaskan bahwa pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) adalah manifestasi dari *great power diplomacy* oleh Cina di kawasan Asia.

BAB IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.